BAB V
KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan tindakan politik China yang dianalisa menggunakan pandangan konstruktivisme, bahwa aspek normatif memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan sebuah negara. China merupakan negara penganut filsafat konfusianisme yang tidak hanya digunakan sebagai landasan budaya masyarakat, tetapi digunakan pula untuk landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan baik di dalam maupun luar negeri. Hal itu dapat dibuktikan dari tindakan politik setiap pemimpin China sebagai hasil dari interpretasi terhadap konfusianisme.

Pada masa Mao Zedong, konfusianisme diwujudkan dalam otoritas penuh pada Partai yang mengharuskan masyarakat tunduk pada pemimpin negara. Sementara pada pemerintahan Deng Xiaoping, ia menggabungkan paham konfusianisme dengan sosialisme, yang menciptakan model pemerintahan "Sosialisme dengan karakteristik China". Model pemerintahan tersebut digunakan sebagai landasan sikap China dalam percaturan internasional sampai saat ini. Kemudian pemerintahan selanjutnya bertugas memperkuat sosialisme dengan karakteristik China melalui modernisasi yang dilakukan oleh Jiang Zemin. Ia memperkenalkan *Three Represents* sebagai kerangka kerja selama masa pemerintahannya, yang mencakup peradaban material, budaya maju, dan memperluas jangkauan partai ke semua lapisan masyarakat. Sementara itu, Hu Jintao dan Xi Jinping keduanya memiliki fokus lebih pada arah kebijakan luar negeri dengan memperluas ekspansi China. Konfusianisme diartikan sebagai perwujudan masyarakat dunia yang harmonis menurut Hu Jintao. Sementara Xi Jinping mengartikulasikan konfusianisme dalam Mimpi China sebagai cita-cita masyarakat China untuk memperoleh peradaban yang maju dalam segala bidang baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, konfusianisme juga berperan sebagai limitasi sikap China terhadap fenomena internasional. Baru-baru ini

China menunjukkan sikap politik luar negerinya dalam menanggapi isu globalisasi ekonomi yang berkembang. Tidak dipungkiri bahwa globalisasi ekonomi yang terjadi pada abad ini telah didominasi oleh nilai atau paham dari Barat seperti kapitalisme dan demokrasi. Hal itu tidak dapat diterima secara langsung oleh China dan negara sosialis lainnya yang berkembang di Asia, Afrika, dan Eropa. Hal tersebut mendorong China untuk menciptakan globalisasi ekonomi ala China dengan prinsip-prinsip sosialisme dan konfusianisme sebagai *counter* nilai Barat dalam globalisasi ekonomi sekarang ini. Kemudian, Presiden Xi Jinping mengesahkan *community of common destiny* yang digunakan sebagai platform kebijakan luar negeri anti Barat dalam globalisasi ekonomi. Sebagai manifestasi dari *community of common destiny*, China membentuk *One Belt One Road* (OBOR) yang beranggotakan negara-negara berkembang sebagai *counter* nilai Barat. Nilai *community of common destiny* menjadi landasan utama dari proyek OBOR untuk mengikat loyalitas negara-negara anggota OBOR dalam satu kerangka berpikir yang sama.

Tindakan politik China sesuai dengan kajian studi ilmu hubungan internasional yang memberikan pemahaman luas tentang polarisasi hubungan antarnegara. Penelitian ini menemukan dua fakta relevansi tersebut. Pertama, perkembangan globalisasi ekonomi tentu memancing respon yang berbeda-beda dari setiap negara, termasuk China. Terlebih lagi, globalisasi ekonomi didominasi oleh paham Barat seperti Kapitalisme dan Demokrasi. Kedua, negara bertindak tidak hanya atas dasar material, tetapi juga aspek-aspek normatif sesuai dengan pemikiran konstruktivisme dalam studi hubungan internasional. Dalam hal ini, China memahami globalisasi ekonomi ala Barat berdasarkan prinsip sosialisme dengan karakteristik China. Sehingga, China membentuk OBOR sebagai *counter* nilai Barat yang berlandaskan pada *community of common destiny*.

Berdasarkan pemikiran Christian Reus-Smith, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa tindakan

politik China di atas, yakni nilai domestik dan struktur internasional. Deri segi nilai domestik, c*ommunity of common destiny* mengadopsi nilai konfusianisme berupa ketulusan, hubungan baik, saling menguntungkan, dan inklusivitas. Berangkat dari empat nilai tersebut, China membentuk OBOR untuk mewujudkan *tian xia wei gong* atau *one home for all* dengan prinsip *sharing*.

Sementara dari struktur internasional berupa globalisasi ekonomi ala Barat, China menanggapinya melalui prinsip sosialisme dengan karakteristik China. China mentrasnformasi sistem kapitalis ke dalam sistem sosialis, sehingga memberikan hak kepada negara untuk campur tangan dalam sistem pasar bebas di China. Kasus lain juga terdapat dalam pembentukan institusi keuangan global, China mendirikan *Asian Infrastruktur Investment Bank* (AIIB) sebagai tandingan *International Monetary Fund* (IMF) dalam membantu pembangunan negara-negara berkembang. China tidak setuju dengan sistem paternalistik antara negara maju dan negara berkembang yang berlaku di IMF. Sehingga negara maju dapat mengeluarkan kebijakan yang merugikan negara berkembang tanpa mempertimbangkan kondisi internal negara berkembang. Sementara AIIB menawarkan posisi kesetaraan antara negara maju dan negara berkembang dalam proses pembiayaan demi terwujudnya pembangunan bersama. China juga memiliki tujuan untuk membuat tata kelola global yang lebih adil dengan globalisasi ala China. Tawaran untuk mewujudkan globalisasi ala China diterima baik oleh negara-negara terutama di kawasan Afrika, Asia, dan sebagian Eropa.

Namun, sikap China mendapat kritik dari Amerika Serikat bahwa China tidak akan bertahan lama dalam arena globalisasi jika tidak mereformasi sistem politik menjadi demokrasi dan kapitalis. Menjawab kritik Amerika Serikat, China kemudian mendirikan OBOR berdasarkan prinsip sosialisme dengan karakteristik China untuk meng-*counter* nilai Barat. OBOR memiliki enam prinsip sebagai wadah integrasi nilai China dan *counter* nilai Barat, yaitu meningkatkan kesadaran akan strategi dengan mengadvokasi

nilai-nilai yang menjadi cita-cita bersama; keterbukaan, inklusivitas, dan saling menguntungkan; pendekatan multi-cabang dan seimbang; bertujuan untuk terobosan utama di tengah perkembangan progresif; operasi berbasis pasar dengan arahan pemerintah; dan, meluncurkan inisiatif baru sambil memanfaatkan sumber daya yang ada.

Melalui OBOR, China membuktikan bahwa negara sosialis dapat bertahan dengan menciptakan globalisasi ala China. Terbukti, negara anggota OBOR mencapai 60 negara, dengan populasi dunia mencakup lebih dari 60%. Sebanyak 71 negara yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang telah terlibat dalam proyek tersebut. Enam koridor ekonomi pun terlah dibangun yaitu *the China–Mongolia–Russia Economic Corridor* (CMREC), *the New Eurasian Land Bridge* (NELB); *the China–Central and West Asia Economic Corridor* (CWAEC); *the China–IndoChina Peninsula Economic Corridor* (CIPEC); *the China–Pakistan Economic Corridor* (CPEC), dan *the Bangladesh–China–India–Myanmar Economic Corridor* (BCIMEC) (Brødsgaard & Rutten, 2017: 257). Koridor tersebut berfungsi sebagai sarana *sharing* dan transfer ilmu pembangunan oleh China kepada negara-negara berkembang.

Sebagian besar orang melihat proyek OBOR semata-mata hanya proyek ekonomi antarnegara Asia, Afrika, dan Eropa. Namun, proyek OBOR lebih dari sekedar ekonomi, China menggunakan OBOR sebagai alat infiltrasi nilai China kepada negara lain melalui prinsip-prinsip kerjasama. Disisi lain, cara tersebut juga digunakan untuk menggait opini negara-negara agar mengikuti jalan globalisasi ekonomi ala China.

Selanjutnya, perlu disadari bahwa penulis dalam skripsi ini memiliki beberapa kekurangan karena keterbatasan instrumen penelitian hanya pada studi pustaka. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna menunjang karya tulis ini menjadi lebih baik. Penulis juga menaruh harapan agar karya tulis ini dapat diteliti lebih lanjut sehingga memberikan wawasan baru bagi generasi selanjutnya.